

ABSTRAK

Penelitian mengenai efektifitas penerapan sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi (studi kasus pada Pengadilan Negeri Semarang) bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis lebih dalam mengenai efektifitas pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti. Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membahayakan stabilitas dan keamanan serta pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai tindak pidana yang berdampak pada kerugian negara, yang menjadi esensi terpenting dalam pemberantasan korupsi adalah menyangkut pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan apakah penerapan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara dapat berlaku secara efektif berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menjawab pertanyaan pada tesis ini menggunakan teori pemidanaan, teori bekerjanya hukum dan teori system hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *juridis empiris* dengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik studi dokumen dan wawancara serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu *purpose sampling* dalam menentukan sample penelitian. Data yang telah didapat, dianalisis secara kualitatif atau lebih dikenal dengan istilah analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa penerapan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara telah diterapkan namun belum dapat berlaku efektif dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi serta menekan jumlah tindak pidana korupsi yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini berdasarkan data perkara korupsi tahun 2016 sebanyak 14 kasus meningkat menjadi 7 kasus pada tahun 2017. Pengembalian kerugian negara pada tahun 2016-2017 adalah sebesar Rp8.415.837.687 yang merupakan per korupsi tahun 2014-2015. Sedangkan untuk perkara korupsi tahun 2016-2017 hingga saat ini belum ada tercatat pengembalian kerugian negara. Adapun kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait pengembalian kerugian negara adalah harta terpidana yang telah berpindah tangan, administrasi kependudukan ganda, serta lamanya proses peradilan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dilakukan eksekusi.

Kata Kunci : *efektifitas, sanksi pidana tambahan, pengembalian kerugian negara, korupsi*

ABSTRACT

This research on the effectiveness of the application of additional criminal sanction to refund losses in the state of corruption (a case study in Semarang District Court) aims to describe and analyze more deeply about the effectiveness of such additional criminal indemnification of state corruption. In addition, this study also aimed to determine and assess constraints in the execution of court decisions regarding the return of the country's financial losses with money substitutes. It is undeniable that the current crime of corruption is one of the remarkable (extraordinary crime) which endanger the stability and security and economic development of Indonesia. As a crime that affects the losses to the state, the essence of the most important in combating corruption is related to the return of state losses due to corruption. Under these conditions the question arises whether the application of additional punishment in the form of indemnification country may become effective under the provisions of Article 18 of Act No. 31 of 1999 on Corruption Eradication Jo. Act No. 20 of 2001 on the Amendment of Act No. 31 of 1999 on Corruption Eradication. To answer the question in this thesis so used the theory of criminal justice, the theory legal enactment and theory of the legal system.

The method used in this research is empirical juridical with the nature of a descriptive study using primary and secondary data sources to study engineering documents and interviews as well as reading materials related to the issues. This study uses non-probability sampling technique is purposive sampling to determine the research sample. As for the overall data which have been obtained, analyzed qualitatively, or better known as qualitative descriptive analysis.

Base on the research has been done, it can be seen that the application of additional punishment in the form of indemnification countries have applied but have not been able to be effective in efforts to recover state losses due to corruption and suppress the amount of corruption that occurred in Semarang District Court Jurisdiction. It is based on data from the 2016 corruption cases as many as 14 cases decreased to 7 cases in 2017. The return loss of the country in 2016 to 2017 amounted to Rp. 8.415.837.687, - which is a corruption case in 2014-2015. As for the corruption cases in 2016-2017 until now there has been no recorded indemnification countries. The constraints in the implementation of the court decisions related to the return of state losses, is convicted assets and property that has been transferred, multiple population administration and duration of the judicial process to verdict and binding execution to be carried out.

Keywords: *Effectiveness, Additional CriminalCriminal , Return loss, Corruption.*